

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konflik pertambangan timah di Benteng Kota merupakan salah satu bentuk perebutan lahan ekonomi antara masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dengan pihak penambang. Keberadaan TI Rajuk dianggap suatu hal yang merugikan bagi nelayan lantaran telah menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Terjadinya persingungan yang melibatkan komunitas nelayan dengan pihak pengelola tambang tidak hanya disebabkan tentang masalah perebutan lahan ekonomi saja, akan tetapi juga disebabkan oleh perjanjian pembagian hasil Tambang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya menyebutkan bahwa masuknya TI Rajuk diwarnai dengan perjanjian kepada masyarakat, termasuk kepada pihak nelayan sebanyak tiga persen, akan tetapi pada akhirnya tidak sesuai apa yang dijanjikan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat pertambangan TI Rajuk membuat keadaan sosial di Benteng Kota tidak stabil. Keadaan nelayan yang semakin terhimpit membuat komunitas nelayan melakukan demonstrasi ke kantor Bupati untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Komunitas nelayan yang tergabung dari berbagai Desa seperti nelayan Batu putih, nelayan Ranting HNSI, dan nelayan Bintang Laut. Didukung oleh berbagai organisasi seperti HNSI,

formnebak dan aparat Desa setempat. Aksi tersebut tidak memberikan respon yang diharapkan oleh nelayan. Aksi kemudian berlanjut pada tahun 2016 dimana diadakannya Audiensi yang melibatkan komunitas nelayan dengan pihak penambang. Pada audiensi tersebut juga hadir Kapolres Bangka Barat dan Bupati Bangka Barat. Bupati Bangka Barat sempat berjanji akan menutup TI Rajuk, akan tetapi tidak kunjung terealisasi.

Sebagian nelayan yang tergabung dalam komunitas mulai beralih untuk memilih memanfaatkan keberadaan TI Rajuk, dalam artian mendukung jalannya aktivitas TI Rajuk. Dibuktikan adanya pada 9 september 2017 dilakukannya aksi oleh masyarakat penambang di Benteng kota dan Panitia TI rajuk beserta perwakilan nelayan untuk menuntut agar TI Rajuk tetap beroperasi, Akan tetapi permintaan mereka tidak dapat dikabulkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Terpecahnya komunitas nelayan memicu pergerakan semakin melemah. Situasi dan kondisi masyarakat Desa Benteng kotasemakin tak kondusif. Keadaan masyarakat nelayan semakin terjepit, sehingga pergerakan masyarakat dilakukan dengan cara melakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan melalui surat menyurat yang salah satunya ditunjukkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, akan tetapi juga tidak berhasil. Gerakan sosial masyarakat pada akhirnya terhenti lantaran kurangnya dukungan dari berbagai pihak, nelayan

berputus asa dan hanya mencoba mencari ikan yang jaraknya lebih jauh sampai ke perbatasan dengan laut Desa Kundi.

Konflik berakhir pada 10 Desember 2017, konflik berakhir ditandai adanya kepulangan warga Selapan pasca Tragedi berdarah yang menewaskan pemuda Desa Air Lintang. Tewasnya warga Desa Air Lintang memicu amukan warga kepada warga Selapan, amukan warga diwarnai aksi pembakaran sejumlah ponton dan pada akhirnya mengusir warga yang tinggal di Dusun Lampu Merah Benteng Kota. Kondisi masyarakat sampai sekarang ini terbilang kondusif tanpa ada konflik yang nyata diantara kedua belah pihak yang terjadi sebelumnya.

Konflik pertambangan timah telah menimbulkan perpecahan antarmasyarakat itu sendiri seperti seperti antar nelayan dan antar etnis di Benteng Kota. Perpecahan disebabkan yang adanya pertimbangan ekonomi masyarakat. Apalagi profesi yang ditekuni kurang menjanjikan, sehingga Timah mulai dilirik karena dianggap komoditi yang paling unggulan dibandingkan komoditi lainnya. Sebagian nelayan lainnya tetap konsisten dengan pendiriannya untuk menolak TI Rajuk, lantaran merasa hasil bumi di Laut Benteng Kota merupakan warisan dan patut untuk terus dilestarikan.

Dinamika konflik pertambangan timah di Benteng Kota dapat dikatakan cukup kompleks dan mengalami perjalanan yang cukup panjang. Sepanjang penolakan yang dilakukan dan respon nyatapun telah dilakukan dari pihak

pemerintah, akan tetapi tidak kunjung dapat di hentikan secara permanen. Perpecahan adalah salah satu unsur penyumbang dan pendukung TI Rajuk tetap bertahan hingga kurang lebih 14 tahun lamanya. Apalagi diperkuat pasca kerusuhan Tempilang yang menyebabkan berakhirnya konflik dikalangan masyarakat akibat TI Rajuk merupakan salah satu hasil dari persatuan dari seluruh masyarakat dari berbagai elemen yang dampaknya hingga kini kondisi sosial masyarakat semakin kondusif.

## **B. Impikasi Teoritis**

Dalam penelitian ini analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan model pemetaan konflik teori pilihan rasional menurut Mancur Olson. Pertama model pemetaan konflik menurut Wehr dan Bartos. Model pemetaan konflik merupakan cara untuk menggambarkan suatu masalah dengan memetakan konflik berdasarkan tahapannya hingga tersusun secara sistematis. Pemetaan konflik menghibungkan pihak-pihak dengan masalah pihak lainnya, memetakan situasi mulai dan dikupas secara mendalam. Dalam mengkaji konflik pertambangan Timah di Benteng Kota menggunakan pandangan Wehr dan Bartos dengan memetakan tahap-tahapan konflik mulai dari *Specify the context*: yaitu melihat akar atau sejarah konflik, dalam kaitannya konflik pertambangan timah disebabkan oleh kerugian yang dirasakan oleh nelayan akibat kerusakan lingkungan dan pembagian fee yang tidak sesuai. Berlanjut pada *Identify the*

*parties*: yakni melihat pihak-pihak yang berkonflik baik pihak utama, dalam konteksnya konflik utama dalam hal ini adalah nelayan dengan pengelola TI Rajuk. *Separate causes from consequences*: menelusuri sebab akibat dari konflik pertambangan timah. Akibat sampingan dari konflik pertambangan timah yakni terdapat adanya disharmonisasi antar masyarakat baik itu antara masyarakat itu sendiri dan pihak pengelola TI Rajuk. Selanjutnya *separate goals from interest goals*: menelusuri tujuan dari konflik itu sendiri, sehingga dalam kaitannya konflik pertambangan timah sebagai upaya pemenuhan tuntutan nelayan untuk menyelamatkan ekosistem laut, sedangkan dari pihak pengelola tambang bertujuan untuk mempertahankan perekonomian juga sebagai pemenuhan kebutuhan.

Selanjutnya *Understand the dynamics* : memahami dinamika konflik yang terjadi. Dalam hal ini konflik pertambangan timah sejak tahun 2014 sampai pada tahun 2017 menguraikan kisah yang berbeda, dimana pada tahun 2014 menceritakan gerakan massa oleh nelayan di kantor Bupati untuk pertama kalinya. Pada tahun 2016 diadakannya audiensi antara kedua belah pihak yang berkonflik dengan menghadirkan pihak netral yakni Bupati Parhan Ali. Kemudian pada tahun 2017 adanya gerakan penolakan sebagai bentuk perlawanan dari pihak Pengelola TI Rajuk dan masyarakat pro TI Rajuk. *Search for positive functions*: mencari tindakan yang mengarah pada penyelesaian yaitu dengan melakukan negosiasi dari kedua belah pihak pengelola tambang dengan

nelayan dan juga adanya intervensi dari pihak kepolisian. Kemudian yang terakhir Understand the regulation: memahami potret regulasi yang akan menggawangi proses konflik. Pada konteks konflik pertambangan timah yaitu dikeluarkannya enam point kesepakatan atau perjanjian dari masyarakat Tempilang dengan warga asal Selapan. Perjanjian dikeluarkan sebagai bentuk kemarahan masyarakat atas tewasnya Peki warga Desa Air lintang. Meskipun diputuskan secara sepihak, akan tetapi dengan dikeluarkannya perjanjian tersebut telah memicu berakhirnya konflik pertambangan timah di yang melibatkan nelayan dengan pihak pengelola TI Rajuk.

Olson mengatakan bahwa masyarakat terlibat dalam aksi-aksi kolektif merupakan manifestasi sebuah tindakan dari individu-individu yang rasional dan dilakukan secara sadar untuk mengejar kepentingan individunya. Dalam hal ini konflik pertambangan timah segala keterlibatan masyarakat dalam aksi-aksi kolektif seperti demonstrasi, audiensi dan lain sebagainya bukan tanpa alasan. Alasan yang memicu keterlibatan masyarakat adalah berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari keterlibatan individu. Jika keterlibatan mereka memberikan keuntungan, maka individu tersebut akan memilih untuk terlibat. Dalam kaitannya, Keterlibatan nelayan dalam demonstrasi disebabkan karena menurunnya hasil tangkapan laut sehingga berdampak pada pendapatan harian nelayan. Apalagi bantuan dari pihak pengelola TI Rajuk tidak sesuai harapan nelayan. Dengan keterlibatan dalam aksi

mereka. Situasi di laut dapat kembali kondusif dan pendapatan nelayan kembali normal seperti semula.

Sebaliknya, menurut Olson jika keterlibatan individu tidak memberikan manfaat bagi individu, maka individu tersebut cenderung memilih untuk tidak terlibat. Seperti yang dialami nelayan seiring berjalannya waktu keterlibatan nelayan tidak membawa dampak apapun. Sehingga sebagian dari mereka memisahkan diri dari kelompok nelayan dengan membentuk kelompok nelayan baru yakni kelompok Tanjung raya indah.

Selanjutnya Olson menjelaskan bahwa “Jika anggota-anggota dalam beberapa organisasi memiliki kepentingan dan tujuan bersama, jika mereka akan lebih baik jika tujuan bersama tersebut dapat tercapai, mereka akan bertindak untuk mencapai tujuannya sebagai bentuk rasionalitasnya dan kepentingan atas dirinya. Meskipun individu-individu akan mencapai tujuan kolektif kelompoknya mengikuti kerasionalanya dan kepentingan atas dirinya”.

Aksi demonstrasi tidak hanya dilakukan oleh pihak nelayan tatapi juga ada perlawanan atau tindakan balasan dari pihak pengelola TI Rajuk. keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi untuk mencapai kepentingannya terutama berkaitan dengan masalah ekonomi, karena keberadaan TI Rajuk dianggap menguntungkan bagi mereka serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan

seperti terlibat dalam tim pengelola TI Rajuk, Ngereman, menjaga ponton TI pada malam hari dan lain sebagainya.

### **C. Saran**

Berbicara dengan timah, melekat dengan istilah persoalan yang muncul dikalangan masyarakat, dapat diartikan bahwa dimana ada timah, disitu ada persoalan. Persoalan timah di Bangka Belitung selalu menimbulkan persoalan dimana-mana, seperti di Belinyu, Toboali, mentok dan termasuk Tempilang. Persoalan ini seharusnya dijadikan pembelajaran agar konflik yang terjadi dikalangan masyarakat dapat diminimalisir.

Konflik di Tempilang merupakan salah satu pelajaran besar bagi pemerintah agar lebih sigap dalam menghadapi persoalan dikalangan masyarakat tanpa harus merugikan pihak manapun. Perlu adanya langkah maupun kebijakan seperti mengeluarkan Peraturan daerah tentang zona yang boleh ditambang tanpa mengganggu lahan ekonomi masyarakat. Selain itu pihak aparat Desa seharusnya turut tegas dan transparan dalam mengambil keputusan terkait masuknya aktivitas pertambangan pada suatu wilayah, agar saling berkesinambungan. Peran dari pihak aparat kepolisian juga semestinya dilaksanakan dengan tegas dan tanpa muluk-muluk, jika memang ilegal seharusnya ditindak sesuai dengan proses hukum sebagaimana seharusnya, demi terwujudnya masyarakat tertib, kondusif dan sejahtera.